

## “POLITIK TANPA MAHAR”: SEMIOTIKA JARGON KOMUNIKASI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI ERA DEMOKRASI BIAYA TINGGI

Ahmad Sahroni<sup>1)</sup>, Guntur Freddy Prisanto<sup>2)</sup>, Niken Febrina Ernungtyas<sup>3)</sup>,  
Anindita Lintangdesi Afriani<sup>4)</sup>\*

<sup>1)</sup> STIKOM InterStudi Jakarta

<sup>2)</sup> STIKOM InterStudi Jakarta

<sup>3)</sup> STIKOM InterStudi Jakarta

<sup>4)</sup> Departemen Komunikasi, Universitas Indonesia

### ABSTRACT

*Money has become the blood for the lives of political parties nowadays. Amid public perception that political parties are entities that cannot be separated from money, the Democratic National Party (Nasdem Party) launched the jargon "Politik Tanpa Mahar". That is, a person who is nominated to be a regional head or a member of the legislature does not need to pay any costs to the party in the nomination process. This study examines how the jargon process was formulated at the internal party level, how the impact on candidates proposed by the party when they conducted political communication, and how the public perceives the jargon and its relation to the assessment of the Nasdem Party. This study uses a qualitative approach with the Roland Barthes semiotic method. The results of the study revealed, first, this jargon itself was born based on the constraints of politics in Indonesia which abort people with good and integrity. With the enactment of jargon, which is also interpreted as a policy, Nasdem also contributed to the eradication of corruption on the internal side. Secondly, the promotion of this jargon caused several legislative candidates to move to the Nasdem party as capital in the interests of raising public votes. Finally, the community considered that this jargon was quite realistic and under the vision and mission of the Nasdem party to provide a positive image in the eyes of the community.*

**Keywords:** *Jargon, Political communication, Political parties, Community perception, Semiotics*

### ABSTRAK

Saat ini, uang telah menjadi darah bagi kehidupan partai politik. Di tengah persepsi masyarakat bahwa partai politik adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan dari uang, Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) meluncurkan jargon “Politik Tanpa Mahar”. Maksudnya, seseorang yang dicalonkan menjadi kepala daerah atau anggota legislatif tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kepada partai dalam proses pencalonannya. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses jargon tersebut dirumuskan pada tingkat internal partai, bagaimana dampaknya terhadap para kandidat yang diajukan partai ketika mereka melakukan komunikasi politik, serta bagaimana publik mempersepsikan jargon tersebut dan relasinya dengan penilaian terhadap Partai Nasdem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian mengungkapkan, pertama, jargon ini sendiri terlahir atas dasar kendala dari politik di Indonesia yang menggugurkan orang-orang baik dan berintegritas. Dengan diberlakukannya jargon, yang juga diartikan sebagai kebijakan, Nasdem turut berkontribusi dalam pengentasan korupsi di pihak internal. Kedua, diusungnya jargon ini menyebabkan beberapa calon legislatif, untuk berpindah ke partai Nasdem sebagai modal untuk kepentingan menaikkan suara publik. Terakhir, masyarakat menilai bahwa jargon ini cukup realistis dan sesuai dengan visi misi partai Nasdem sehingga memberikan citra yang positif di mata masyarakat.

**Kata kunci:** Jargon, Komunikasi politik, Partai politik, Persepsi masyarakat, Semiotika

---

\* Korespondensi Penulis

Email: lintangdesi@gmail.com

## PENDAHULUAN

Karakteristik politik bervariasi secara signifikan antar berbagai daerah dan negara di dunia. Namun, tidak ada di bagian dunia manapun dimana uang tidak menjadi masalah dalam proses pengambilan keputusan politik.

James Kerr Pollock menulis pada tahun 1932 bahwa, “hubungan antara uang dan politik telah menjadi salah satu masalah besar dalam pemerintahan demokratik. Kehidupan politik yang baik tidak mungkin terwujud sepanjang penggunaan uang tidak dikendalikan.” Uang memberikan akses pada *basic tools* dari demokrasi modern: belanja iklan, mengoperasikan partai politik, memilih para kandidat, memobilisasi pemilih dan *polling*. Atas dasar alasan ini pembiayaan politik mempengaruhi hampir seluruh aspek dari demokrasi, baik pada negara dengan demokrasi yang masih berkembang maupun yang sudah terkonsolidasi.

Definisi paling sempit dari pembiayaan politik adalah uang yang digunakan untuk pemilihan umum atau pembiayaan kampanye. Uang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan kandidat untuk posisi pejabat publik, oleh partai politik asal kandidat atau individu-individu lain maupun kelompok pendukung yang terorganisir. Partai politik memainkan peran penting dalam kampanye di bagian manapun di dunia, karenanya menjadi sulit untuk membedakan antara biaya kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan biaya rutin operasional. Oleh sebab itu menjadi beralasan jika dana partai politik dikategorikan sebagai pembiayaan politik juga. Ahli perbandingan politik Jerman terkemuka, Karl-Heinz Nassmacher, menyatakan bahwa terdapat perbedaan fundamental dalam pembiayaan kampanye antara politik Amerika Utara yang *candidate-oriented* dan politik Eropa yang *party-oriented*. Di Eropa terminologi politik akan mengacu pada partai politik, demikian juga dengan pembiayaannya.

Di luar biaya terkait kampanye, komunitas demokratik membutuhkan dialog yang berkesinambungan dengan warga negara yang luas. Sebuah proses yang jelas

membutuhkan biaya. Yang menjadi *concern* adalah uang dapat menjadikan politisi menjadi lebih responsif pada kontributor pendanaan daripada dengan konstituennya.

Pembiayaan kampanye dan partai politik hanyalah dua jenis dana politik, yang bisa jadi bukan paling penting dan bukan hanya itu biaya demokrasi. Banyak aktor politik dan individu non-partai yang terlibat dalam kompetisi politik dengan tujuan politik yang jelas; seperti mempertajam agenda kebijakan publik, mempengaruhi debat antar kandidat dalam pemilu beserta hasil pemilu itu sendiri. Aktivitas ini juga membutuhkan pembiayaan.

Dalam situasi dimana uang menjadi darah bagi kehidupan partai politik, Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), meluncurkan jargon “Politik Tanpa Mahar”. Artinya seseorang yang dicalonkan sebagai kepala daerah atau anggota legislatif tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kepada partai dalam proses pencalonannya.

Pilihan jargon tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu, untuk dapat mendiferensiasi Partai Nasdem dari partai-partai politik lain. Di tengah persepsi masyarakat bahwa partai politik adalah entitas yang tak dapat dipisahkan dari uang, yang terlihat dari banyaknya kader partai politik yang terlibat masalah korupsi, Partai Nasdem berusaha mencuri perhatian publik. Jargon yang ditawarkan Partai Nasdem secara implisit menyampaikan bahwa uang adalah prioritas ke sekian bagi Partai Nasdem. Kompetensi dan kapasitas kandidat adalah lebih penting. Selain itu Partai Nasdem berupaya menunjukkan perbedaannya dengan partai-partai lain yang masih belum selesai dengan persoalan keuangan untuk mendanai operasional maupun kampanye partai.

Jargon ini mampu menarik perhatian publik. Dengan berpolitik tanpa mahar, maka akan menurunkan biaya berpolitik, sehingga memperkecil kemungkinan korupsi. Donny Gahril Adian, seorang pengamat politik, menyatakan bahwa langkah Partai Nasdem memiliki makna positif. Permasalahan korupsi tidak akan bisa tuntas selama pembiayaan politik masih cukup tinggi. Oleh karena itu,

upaya yang dilakukan NasDem patut dicontoh. Ia menyebutkan, partai yang memberlakukan politik tanpa mahar justru memberikan beban tersendiri bagi para caleg karena tidak ada alasan bagi para caleg ketika terpilih untuk mencari peluang guna mengembalikan modal dan utang biaya berpolitik.

Bertitik tolak dari realitas tersebut, dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana awal mula dan proses jargon tersebut dirumuskan pada tingkat internal partai, bagaimana dampaknya terhadap para kandidat yang diajukan partai ketika mereka melakukan komunikasi politik, bagaimana pemilih mempersepsikan jargon tersebut dan relasinya dengan penilaian terhadap Partai Nasdem.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian ini terdiri atas ciri-ciri yang meliputi: latar alamiah, sehingga data diperoleh secara utuh (*entity*), manusia sebagai instrumen utama, terjadi hubungan langsung antara peneliti dan data, analisis dilakukan secara induktif yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan serta pengkajian dokumen berkecenderungan ke arah proses daripada hasil.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder, sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Sumber data primer dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Pengurus DPP Partai Nasdem, khususnya yang menginisiasi dan terlibat sejak awal perumusan jargon komunikasi politik “Politik Tanpa Mahar”.
2. Calon dalam pemilihan legislatif Partai Nasdem yang merasakan dampak dari jargon komunikasi politik “Politik Tanpa Mahar”.
3. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019 yang mengetahui tentang jargon komunikasi politik “Politik Tanpa Mahar”.

Sementara data sekunder penelitian ini akan dihimpun dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Buku *Moralitas Republik* karya Willy Aditya (Jakarta: Populus Institute, 2016)
2. Berbagai pemberitaan di media massa *online* terkait berita, komentar maupun analisis tentang jargon komunikasi politik “Politik Tanpa Mahar” 1 tahun terakhir (Oktober 2018-Oktober 2019)

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan semiotika Roland Barthes, yaitu analisis semiotika dengan signifikansi dua tahap untuk menunjukkan representasi komunikasi politik. Semiotika Roland Barthes digunakan karena lebih analitis dalam menyingkap segala sesuatu di balik tanda, yaitu makna denotasi dan konotasi yang tersimpan dalam produksi tanda. Berbagai simbol dan teks dalam jargon komunikasi Partai Nasdem dapat diungkap dan diartikan maknanya serta direpresentasikan secara kritis dengan sebuah metode yang dapat menguraikan tanda-tanda di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Nasdem yang dibentuk tahun 2011 ini memiliki visi dan misi utama, yakni Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Di balik jargon tersebut, Nasdem menyatakan upayanya untuk memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan, dalam konteks keadilan dan kebijaksanaan hukum di Indonesia sesuai cita-cita Proklamasi 1945.

### Proses Perumusan Jargon Nasdem “Politik Tanpa Mahar”

Berangkat dari jargon gerakan perubahan, Nasdem bermaksud menyampaikan perubahan perspektif dalam teori modern, yang didasarkan pada sejarah. Dalam hal ini, perubahan bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai lama yang hilang, melestarikan tradisi lama, dan mengambil tradisi baru. Dengan kata lain, gerakan perubahan yang diwujudkan meliputi

bentuk-bentuk dan perilaku berpolitik yang bersih. Tujuan dari Nasdem sendiri adalah untuk melahirkan kinerja kepemimpinan yang bersih, tegak dan berprestasi.

Arti perubahan juga dapat diartikan sebagai koridor. Koridor untuk memelihara nilai lama dan mengedepankan nilai lama yang baik, tetapi mengadopsi nilai baru yang lebih baik. Hal ini disebut dengan proposionalitas, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, Nasdem membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk bergabung. Melalui hal ini, Nasdem ingin membangun konektivitas dan menjalankan sinergitas antara kandidat dengan publik.

Gagasan ini memberikan pencerahan, terutama di dalam praktik terkait hal-hal yang bersifat mendesak, praktis, dan politik. Oleh karena itu, lahirlah jargon baru dalam cara berpolitik yang disebut dengan politik tanpa mahar. Di balik gagasan yang baru ini, terdapat akar basis ilmu, akidah, syariat, dan moral dengan tujuan menghasilkan pemimpin Indonesia yang bersih.

Di bawah masa kepemimpinan Surya Paloh, Nasdem memperkenalkan jargon "Politik Tanpa Mahar". Dalam buku *Moralitas Republik* karya Willy Aditya disebutkan bahwa gagasan ini dimaksudkan untuk memenangkan simpati rakyat (Aditya, 2016). Di tengah situasi demokrasi yang kalut ini, Nasdem mengeluarkan sebuah terobosan konstruktif yang transformatif. Menurut salah satu pengurus DPP Nasdem, jargon ini tidak hanya sekadar gagasan, namun merupakan sebuah kebijakan.

Jargon ini sendiri terlahir atas dasar kendala dari politik di Indonesia yang menggugurkan orang-orang baik dan berintegritas. Hal ini sesuai dengan adab berpolitik yang dianut Nasdem, yang mana Nasdem sangat mengedepankan ketegasan dan kejujuran. Menurut Surya Paloh, perubahan adalah soal melawan *mainstream* (Aditya, 2016). Oleh karena itu, jargon baru partai Nasdem ini dibentuk dan sekaligus merupakan *branding* partai dalam mencari simpati publik.

Bertolak dari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, mahar menjadi penyebab utama dalam berpolitik dengan

biaya tinggi. Tradisi ini mengakibatkan para kandidat yang berujung pada penyelewengan anggaran publik untuk mengganti biaya "mahar" yang telah dikeluarkan. Hal ini hanya menguntungkan pihak elit, baik elit partai maupun elit lokal untuk menjadi kepala daerah, terutama pada mereka yang sebenarnya tidak memiliki kapabilitas dan prestasi dalam memimpin.

Dengan diberlakukannya politik tanpa mahar ini, Nasdem berupaya dan turut berkontribusi dalam pengentasan korupsi di pihak internal. Uang yang dimiliki partai hanya digunakan untuk memenangkan kandidat dan bukan untuk membayar partai. Disebutkan pula, ketika pemimpin bersih, maka uang-uang rakyat yang memang dikembalikan kepada rakyat akan dialokasikan pula untuk program-program yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat.

Jargon Politik Tanpa Mahar yang ditegaskan oleh Surya Paloh adalah *human incement* dengan praksis *zero cost*. Artinya, kandidat tidak akan dikenakan biaya apapun untuk dapat mendaftar menjadi anggota partai. Pendaftaran kandidat juga dilakukan pada tingkat daerah (DPD), wilayah (DPW), bahkan pusat (DPP). Kemudian, partai juga melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya untuk mengusung kandidat yang berpotensi untuk menang.

DPP Nasdem menambahkan, politik tanpa mahar bisa dikatakan sebagai politik tanpa syarat. Dengan kata lain, partai Nasdem melakukan penerimaan kandidat dengan tidak birokratik. Maksudnya, penerimaan kandidat tidak semata-mata memungut bayaran dan jabatan dari yang bersangkutan, tetapi juga melakukan telenskoting.

Kegiatan riset telenskoting ini merupakan bentuk kerjasama Nasdem dengan empat lembaga survei, yakni Indikator, Indo Barometer, Polmark, dan Charta Politika. Tujuan diadakannya survei ini adalah untuk menjaga objektivitas hasil yang menjadi indikator untuk keputusan pengambilan kebijakan. Adapun telenskoting yang menjadi tolok ukur calon kandidat, yakni meliputi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas.

### Komunikasi Politik Partai Nasdem

Beberapa jurnalisme *online* terkait pemberitaan jargon partai Nasdem “Politik Tanpa Mahar” dalam rentang waktu satu tahun terakhir disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Pemberitaan “Politik Tanpa Mahar” di Media *Online*

No	Media <i>online</i>	Edisi	Judul
1	<a href="http://www.liputan6.com">www.liputan6.com</a>	5 Februari 2019	Politik tanpa Mahar Nasdem Dinilai Perlu Diikuti Parpol Lain
2	<a href="http://www.wartaekonomi.co.id">www.wartaekonomi.co.id</a>	5 Februari 2019	Politik Tanpa Mahar NasDem Positif? Ini Kata Pengamat
3	<a href="http://www.mediaindonesia.com">www.mediaindonesia.com</a>	24 September 2019	NasDem Jaring Calon tanpa Mahar
4	<a href="http://www.nasional.kompas.com">www.nasional.kompas.com</a>	10 Oktober 2019	Denny Indrayana Nyagub Kalsel Lewat Nasdem karena Tanpa Mahar
5	<a href="http://www.nasional.republika.co.id">www.nasional.republika.co.id</a>	5 Februari 2019	Pengamat: Politik Tanpa Mahar Harus Ditiru
6	<a href="http://www.kumparan.com">www.kumparan.com</a>	19 November 2018	NasDem Harap Sistem Politik Tanpa Mahar di Parpol Bisa Cegah Korupsi
7	<a href="http://www.poskotanews.com">www.poskotanews.com</a>	23 September 2019	Nasdem Buka Pendaftaran Pilkada Serentak 2020 Tanpa Mahar
8	<a href="http://www.kabar-nusa.com">www.kabar-nusa.com</a>	23 September 2019	Usung Politik Tanpa Mahar, NasDem Jaring Calon Kepala Daerah 2020
9	<a href="http://www.cnnindonesia.com">www.cnnindonesia.com</a>	24 Mei 2019	Tiga Modal Dulang Suara Ala Partai NasDem
10	<a href="http://www.merdeka.com">www.merdeka.com</a>	18 April 2019	Lolos Parlemen Versi Quick Count, Nasdem Sebut Berkat Politik Tanpa Mahar
11	<a href="http://www.tirto.id">www.tirto.id</a>	25 April 2019	Apa yang Menyebabkan Suara Nasdem Terdongkrak di Pemilu 2019?

12	<a href="http://www.politik.rlmol.id">www.politik.rlmol.id</a>	23 September 2019	Buka Pendaftaran Pilkada 2020 Tanpa Mahar, Nasdem: Ini Bukan Perkawinan Biologis
13	<a href="http://www.politik.antaranews.com">www.politik.antaranews.com</a>	21 Mei 2019	Politik tanpa mahar tempatkan NasDem posisi kelima Pileg 2019
14	<a href="http://www.news.detik.com">www.news.detik.com</a>	23 September 2019	Buka Pendaftaran Pilkada 2020, NasDem: Tidak Ada Mahar

Sumber: data olahan peneliti

Berdasarkan Tabel 1, jargon “Politik Tanpa Mahar” berhasil mengangkat citra baik Nasdem dan dinilai sebagai suatu langkah positif, bahkan akan diikuti oleh partai lain. Berdasarkan fakta yang didapatkan, biaya politik yang tinggi akan cenderung mengarah pada korupsi. Oleh karena itu, dengan adanya jargon ini, diharapkan sebagai upaya pencegahan bahkan penuntasan korupsi karena dengan adanya mahar, sudah dapat menghabiskan setengah dari keseluruhan biaya politik.

Diusungnya jargon ini juga menyebabkan beberapa calon legislatif, maupun calon legislatif yang masih muda untuk berpindah ke partai Nasdem sebagai modal untuk kepentingan menaikkan suara publik. Hal ini juga merupakan strategi partai meninjau bahwa publik sebagai calon pemilih tidak menyukai politik berbiaya tinggi. Oleh karena itu, jargon ini merupakan kekuatan partai dan sebagai *platform* dalam *branding* Nasdem di mata publik.

### Persepsi Masyarakat terhadap Partai Nasdem

Nasdem telah berkiprah selama 8 tahun lamanya sebagai partai politik dan menghasilkan dua gagasan utama, gerakan restorasi dan politik tanpa mahar. Kedua jargon ini telah lama dikenal oleh masyarakat dan beberapa juga memahami makna di balik kedua jargon tersebut. Melalui pemberitaan media Nasdem yang tengah melambung citra positifnya, masyarakat menilai bahwa partai konsisten dalam implementasinya. Hal ini dibuktikan

dengan kandidat Nasdem yang tersangkut kasus korupsi tidak banyak.

“...Bisa dilihat dari *track record* temen Nasdem yang bisa dibbilang hanya 1 atau 2 orang saja yang tersangkut kasus *money* politik... Naah lainnya engga ada...”

-ES

Dari kedua jargon partai Nasdem, jargon terbaru mereka “Politik Tanpa Mahar” lebih melekat dan diingat oleh masyarakat. Menurut mereka, jargon ini tidak hanya sebagai *gimmick* belaka, tetapi terlihat implementasinya dalam berpolitik. Selain itu, masyarakat juga berharap bahwa jargon ini memang benar-benar dilakukan dan tidak hanya untuk mendapatkan respon positif yang sesaat.

“...maksudnya ini gue ngeliatnya salah satu partai yang membawa warna baru yaa, yaa sejauh ini sih komitmennya udah keliatan, dan masyarakat juga udah, udah, udah ada respons positif yaa, dari kalau dari pemberitaan kan kita baca juga mulai dari pilkadanya, terus hasil pilpres kemarin kan juga naik, kalau ga salah ya, jadi memang ada respon positif dari masyarakat, pastinya ada harapan juga dari masyarakat...”

-B

Namun, di balik makna jargon “Politik Tanpa Mahar” terdapat beberapa skeptis dari masyarakat. Gagasan ini memberikan sedikit keraguan bagi mereka mengingat bahwa dalam berpolitik tentu akan membutuhkan dana yang besar. Seharusnya, setidaknya sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat yang mendaftar sehingga makna jargon ini dapat diartikan sebagai peluang mencari simpati dari masyarakat.

“Kalau... Pribadi yoo.. Kalau pribadi eee... fifty fifty lah... Satu sisi memang ado kampanye memang.. Satu sisi memang....” -MS

“Misalnya maharnya ditentukan berapa nilainya atau nominalnya, untuk jadi caleg harus kita setor berapa, misalkan seperti itu gitukan, itukan walaupun kita taulah walaupun gaada mahar sekalipun kampanye pun tetep butuh *cost* gitukan,

ada *cost* nya memang yang harus dikeluarkan orang untuk bersosialisasi, sekedar untuk ngopi, atau apa, para polituksnya juga pada sadar bahwa ada *cost* yang harus dikeluarkan Cuma apakah opsionalnya itu membebani atau tidak, nah itukan yang akhirnya menjadi catatan..” -B

Akan tetapi, jargon “Politik Tanpa Mahar” juga dinyatakan masih realistis dan masih sesuai dengan visi dan misi partai itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena pemimpin partai tersebut sudah memiliki nama besar sehingga sumber dana partai dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan partai.

“Selamo eee... satu patom yoo... program yang diusung nyo samo, dengan apo eee.... Pimpinan atau apo eee... yang dicalonkan nyo dan tidak masalah.. Kalau itu masih samo satu linear yoo... Dengan Visi Misi partai.. Kemudian samo pimpinan apoo eee... program kerja presiden yaa mungkin masih didukung kan, masih bisa di terimo...” -MS

Melihat implementasi dari jargon yang baik yang juga didukung oleh citra positif yang diraih partai Nasdem belakangan ini, masyarakat tengah mempertimbangkan untuk memilih Nasdem sebagai partai pilihan mereka. Namun, tidak hanya citra partai dan kesesuaian jargon saja yang dilihat, pilihan kandidat juga memainkan peranan penting sebagai salah satu faktor mereka dalam memilih.

## SIMPULAN

Jargon “Politik Tanpa Mahar” yang diusung Nasdem memberikan citra positif partai di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatkan hasil perolehan suara Nasdem di beberapa Pilkada dan Pemilu beberapa tahun lalu. Masyarakat menilai bahwa jargon ini cukup realistis dan sesuai dengan visi misi partai Nasdem. Dengan demikian, komunikasi politik melalui jargon terbaru partai Nasdem dapat dikatakan berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ohman, Magnus, *Controlling Money in Politics: An Introduction*, Washington: International Foundation for Electoral Systems, 2013.
- Walecki, Marcin, *Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Political Finance*, International Foundation for Electoral Systems (IFES) 2007.
- Aditya, W. (2016). *Moralitas Republik* (P. Institute, ed.). Jakarta.